

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2017-2018



STATISTIK KEUANGAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2017-2018



**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2017 -2018**

ISSN : 2598-2664
Nomor Publikasi : 34540.1902
Katalog : 7203007.34

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 74 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Distribusi

Penyunting :
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Distribusi

Diterbitkan oleh :
© BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dicetak oleh :
PT. Pohon Cahaya Semesta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2017-2018**

Pengarah :

Johanes De Britto Priyono, M.Sc.

Penanggung Jawab Teknis:

Amirudin, S.Si, MMSI.

Editor :

Chatarina Budi Anggarini, S.ST, M.M.

Penulis :

Sudiyana, S.E, M.M.

Pengolah Data :

Sudiyana, S.E, M.M.

Desain/Layout :

Sudiyana, S.E, M.M.

<https://yogyakarta.pps.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2017-2018 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara teratur telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan data mengenai Realisasi APBD 2017 dan APBD 2018 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk perbaikan publikasi di masa mendatang, tanggapan dan saran-saran dari konsumen data sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, April 2019

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepada,



Johanes De Britto Priyono, M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
I. PENJELASAN UMUM	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Ruang Lingkup	2
1.3. Konsep dan Definisi	2
II. ULASAN RINGKAS	9
Tabel-Tabel	
1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017	10
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 ..	12
3. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017.....	13
4. Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018	14
5. Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.....	15
6. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 ..	17
7. Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017	17
8. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018.....	18
9. Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017	19

10. Persentase Belanja Tidak Langsung Terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013- 2017.....	20
11. Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018	21
12. Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017	22
13. Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018	23

Lampiran Tabel

1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp).....	27
1.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000Rp)	28
1.3. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp)	29
1.4. Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000Rp)	30
1.5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp).....	31
1.6. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp)	32
1.7. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp).	33
1.8. Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp).....	34
2.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (000 Rp).	35
2.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (000 Rp)	36
2.3. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (000 Rp).....	37
2.4. Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (000 Rp)	38
2.5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 (000 Rp).	39
2.6. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000 Rp).	40

2.7. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000Rp.)	41
2.8. Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000Rp.)	42
3.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp).....	43
3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp).....	44
3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp)	45
3.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp).....	46
3.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp).	47
3.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp)	48
3.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp)..	49
3.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp)..	50
4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 (000 Rp)	51
4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000 Rp)..	52
4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000Rp)	53
4.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000Rp).....	54
4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000 Rp).....	55
4.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000 Rp).	56
4.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000Rp).	57
4.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000Rp).....	58
5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp).....	59

5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp)	60
5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp)	61
5.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp).....	62
5.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2018 (000 Rp).	63
5.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000Rp).	64
5.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000 Rp).	65
5.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000 Rp).	66
6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp).....	67
6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp)	68
6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp)	69
6.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp)	70
6.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp).....	71
6.6 Rencana anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp)	72
6.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp).....	73
6.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp).....	74

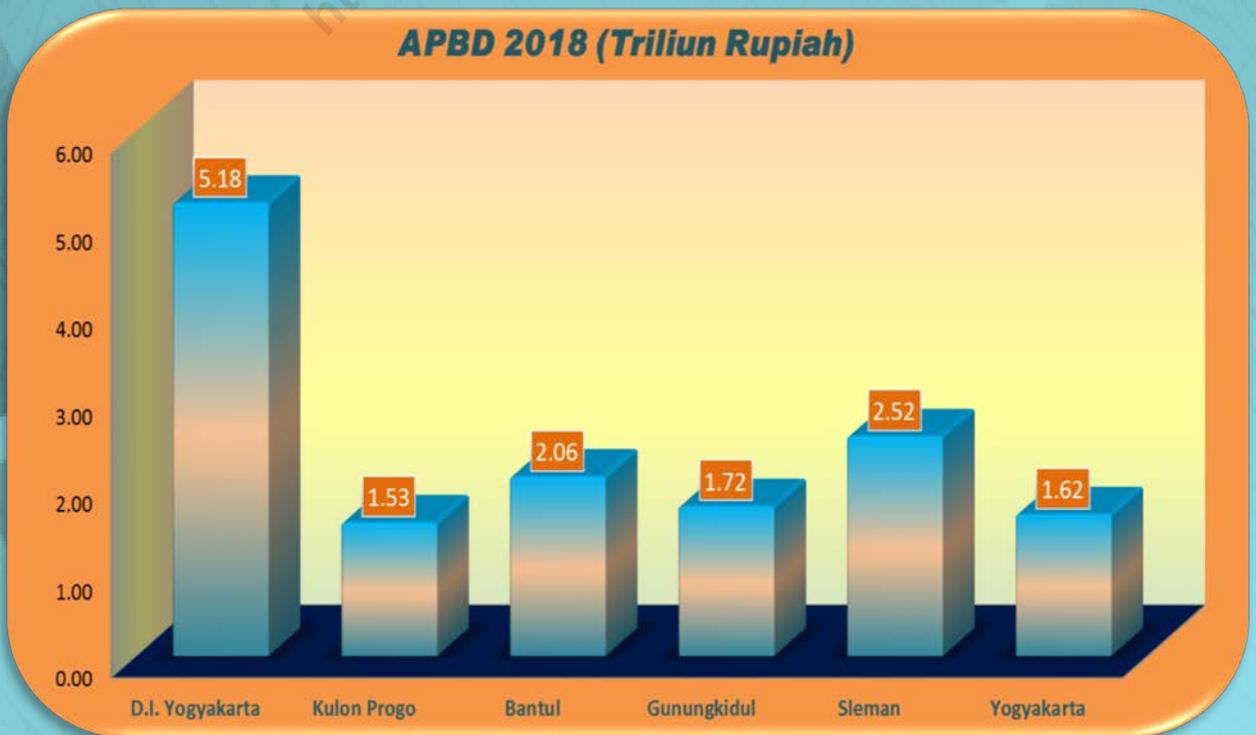
Gambar- Gambar

1. Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (persen).	13
2. Komposisi Realisasi Belanja Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (persen).	19

Realisasi Pendapatan Daerah 2017 (Triliun Rupiah)



APBD 2018 (Triliun Rupiah)



I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan serta menggali sumber-sumber potensi daerah. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu data statistik mengenai keuangan daerah menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisis dan pengambilan keputusan. Kegunaan data keuangan daerah antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi secara makro seperti pendapatan regional, tabel input output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.

I.2. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik keuangan daerah dibedakan antara lain :

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

I.3. Konsep dan Definisi

I.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- 1.1. **Pajak Daerah**

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

1.2. Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Contoh retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perizinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1. Bagi Hasil Pajak.

Bagi hasil pajak terdiri dari bagian penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- ✚ Kebutuhan tidak dapat di perhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- ✚ Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- ✚ Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

I.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tak Langsung

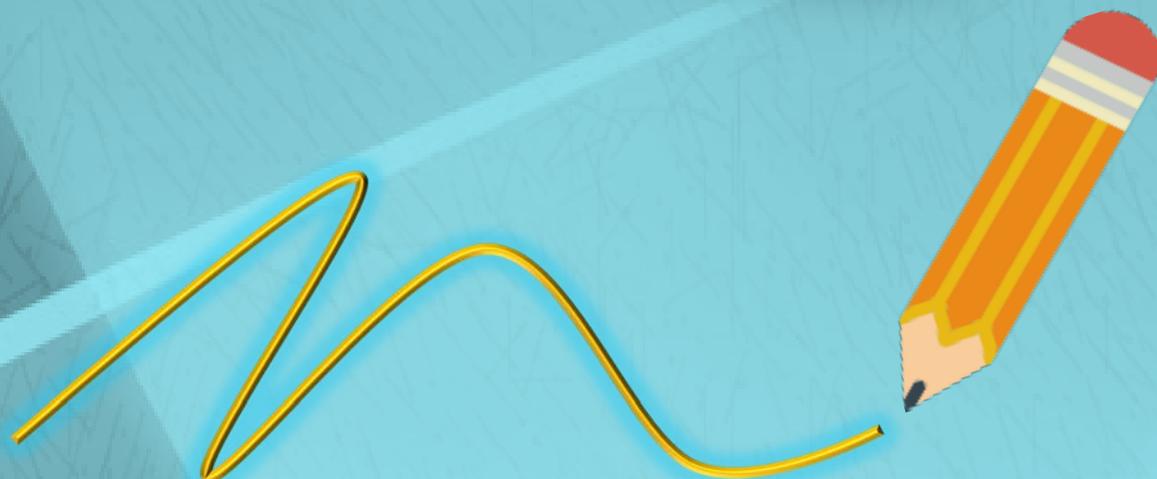
Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kelompok belanja tak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung meliputi :

- ✚ Belanja Pegawai.
- ✚ Belanja Barang dan Jasa.
- ✚ Belanja Modal.

ULASAN



II. ULASAN RINGKAS

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsystem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur urusannya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan hakikat otonomi daerah yang berkenaan dengan pelimpahan kewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Pada Tabel.1 dapat dilihat realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Ratio Pendapatan terhadap Belanja	Surplus/Defisit (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	5 085 245	4 920 627	1,03	3,24
Kab. Kulon Progo	1 425 110	1 430 456	1,00	-0,38
Kab. Bantul	2 086 879	2 076 742	1,00	0,49
Kab. Gunungkidul	1 847 105	1 860 226	0,99	-0,71
Kab. Sleman	2 615 515	2 489 597	1,05	4,81
Kota Yogyakarta	1 658 430	1 484 553	1,12	10,48

Dari tabel tersebut dapat kita amati, bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta mengalami surplus anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2017 sudah dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah. Sedangkan rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul mengalami defisit anggaran atau realisasi pendapatan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan belanja daerah sehingga perlu penambahan pendapatan dari pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta pada tahun 2017 memperoleh pendapatan/penerimaan sebesar 5,085 triliun rupiah dengan total pem belanjaan mencapai besaran 4,920 triliun rupiah. Dengan demikian pada tahun 2017 Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta mengalami surplus keuangan sebesar 165 miliar rupiah.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mencapai nilai 2,615 triliun rupiah. Dengan belanja sebesar 2,489 triliun rupiah membuat kabupaten ini mengalami surplus anggaran sebesar 126 miliar rupiah.

Salah satu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah di atasnya (berupa dana perimbangan) juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- ✚ Pajak Daerah
- ✚ Retribusi Daerah
- ✚ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- ✚ Lain-lain PAD yang sah

Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Berbeda dengan pemerintah provinsi, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu :

- ✚ Pajak Hotel
- ✚ Pajak Restoran
- ✚ Pajak Hiburan
- ✚ Pajak Reklame
- ✚ Pajak Penerangan Jalan
- ✚ Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- ✚ Pajak Parkir

Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, menunjukkan bahwa daerah mampu untuk mencukupi belanja daerah sendiri. Sumbangan PAD terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja tahun 2017, sebagai berikut:

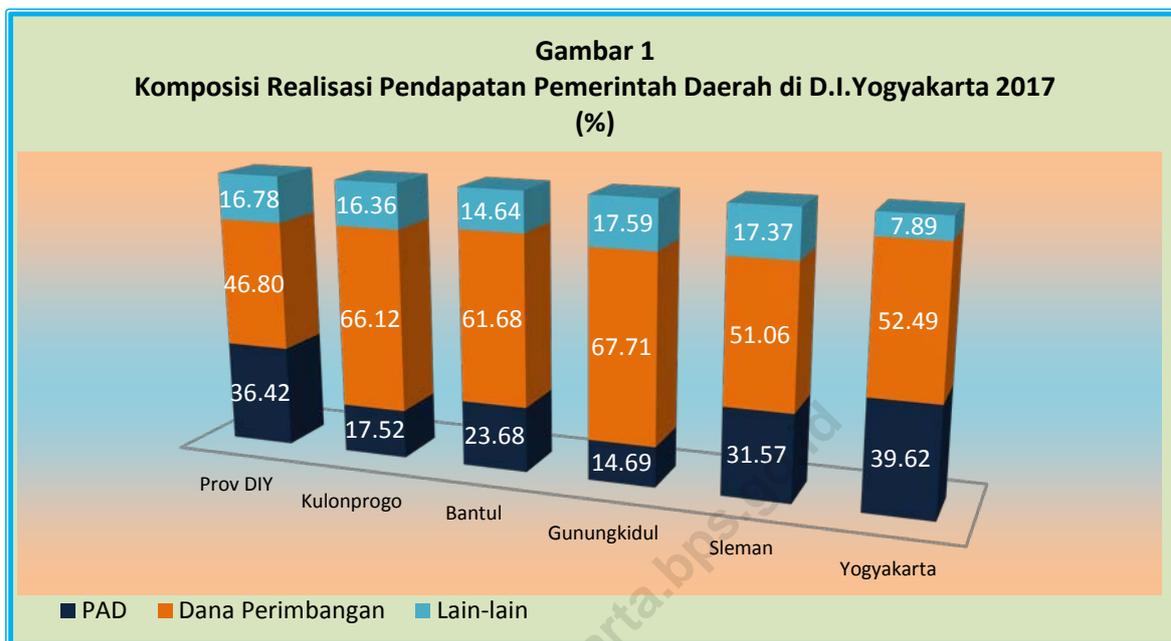
Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.)	PAD thd Pendapatan (%)	PAD thd Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5 085 245	4 920 627	1 851 977	36,42	37,64
Kab. Kulon Progo	1 425 110	1 430 456	249 693	17,52	17,46
Kab. Bantul	2 086 879	2 076 742	494 179	23,68	23,80
Kab. Gunungkidul	1 847 105	1 860 226	271 370	14,69	14,59
Kab. Sleman	2 615 515	2 489 597	825 638	31,57	33,16
Kota Yogyakarta	1 658 430	1 484 553	657 049	39,62	44,26

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 cukup bervariasi. Dari lima kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan kabupaten/kota yang mempunyai persentase PAD terbesar, yaitu mencapai 39,62 persen dari realisasi pendapatannya, disusul kemudian oleh Kabupaten Sleman dengan 31,57 persen. Kabupaten/kota dengan persentase PAD terhadap pendapatan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul,

yaitu 14,69 persen. Sementara itu persentase PAD Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta cukup besar yaitu mencapai 36,42 persen terhadap realisasi pendapatannya.

Komposisi realisasi pendapatan untuk masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Tabel 3
Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 – 2017

Pemerintah Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	Perkembangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
D.I.Yogyakarta	38,87	46,65	46,86	42,93	36,42	-6.31
Kab. Kulon Progo	9,57	14,16	13,92	13,27	17,52	83.08
Kab. Bantul	14,75	19,70	20,02	20,22	23,68	60.54
Kab. Gunungkidul	6,72	11,60	12,26	12,47	14,69	118.63
Kab. Sleman	23,65	27,61	28,03	30,79	31,57	33.48
Kota Yogyakarta	29,25	32,24	35,60	34,26	39,62	35.45

Dalam 5 tahun terakhir secara umum terdapat perubahan yang signifikan, persentase PAD terhadap realisasi pendapatan di 5 kabupaten/kota. Persentase PAD terhadap total pendapatan terbesar yaitu di Kabupaten Gunungkidul sebesar 118,60% persen, dari 6,72 persen pada Tahun 2013 menjadi 14,69 persen pada Tahun 2017. Persentase PAD terhadap realisasi pendapatan di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan terkecil sebesar 33,49 %, yaitu dari 23,65 persen pada Tahun 2013 menjadi 31,57 persen

pada Tahun 2017. Sementara untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir dengan penurunan sebesar 6,30 %, yaitu dari 38,87 persen menjadi 36,42 persen.

Pada tabel 4 dapat dilihat persentase besarnya rencana pendapatan asli daerah terhadap rencana pendapatan dan rencana belanja, hal ini dilakukan untuk memacu peningkatan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Tabel 4
Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rp.)	Rencana Belanja (Juta Rp.)	Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.)	PAD thd Rencana Pendapatan (%)	PAD thd Rencana Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5 182 970	5 544 332	1 734 006	33,46	31,28
Kab. Kulon Progo	1 530 542	1 533 288	207 069	13,53	13,50
Kab. Bantul	2 056 183	2 205 490	420 143	20,43	19,05
Kab. Gunungkidul	1 716 745	1 814 778	208 748	12,16	11,50
Kab. Sleman	2 515 874	2 627 296	762 515	30,31	29,02
Kota Yogyakarta	1 623 734	1 691 313	551 494	33,96	32,61

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga akan memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya dapat di tempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun dalam rangka ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi daerah.

Tabel 5
Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah menurut
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004

Jenis Pungutan	Pemerintah (%)	Provinsi Bersangkutan (%)	Kabupaten /kota Penghasil (%)	Kabupaten /Kota Lain dan Provinsi Bersangkutan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PBB ¹⁾	10,0	16,2	64,8	0,0
2. BPHTB	20,0	16,0	64,0	0,0
3. PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21	80,0	8,0	12,0	0,0
4. Kehutanan				
a. IHPH/IHH	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Provisi Sumber Daya Hutan	20,0	16,0	32,0	32,0
c. Reboisasi	60,0	0,0	40,0	0,0
5. Pertambangan Umum				
a. Land-Rent (Iuran Tetap)	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Royalty iuran Eksplorasi	20,0	16,0	32,0	32,0
6. Perikanan ²⁾	20,0	0,0	0,0	0,0
7. Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2
8. Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2
9. Panas Bumi	20,0	16,0	32,0	32,0

Catatan :

¹⁾ 9 % untuk biaya pemungutan

²⁾ 80% untuk seluruh kabupaten/kota

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah selain dari PAD juga berasal dari Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil bukan pajak bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi). Dasar perolehan dana perimbangan dapat dilihat pada tabel 5.

Sumber pendapatan lain yang sangat berpengaruh ada lah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan APBN (penerimaan dari minyak dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari non-migas dan non-pajak) dialokasikan untuk DAU. Sepuluh persen (10%) DAU dibagi ke provinsi, dan sembilan puluh persen (90%) dibagi ke kabupaten/kota.

Alokasi DAU tergantung dari bobot (tolak ukur) daerah. Penentuan Tolak Ukur (Bobot) di dasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolak ukur penentuan DAU.

DAU di alokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil (sumbangan DAU kecil), atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri.

Pada tahun 2017 besarnya DAU yang di alokasikan ke Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta sebesar 1,314 triliun rupiah atau mencapai 25,85 persen dari pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran ini mampu mencukupi 26,71 persen dari belanja Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta.

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta yang memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya terendah adalah Kabupaten Sleman dengan 38,10 persen, di ikuti Kota Yogyakarta sebesar 39,71 persen. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya tertinggi yaitu mencapai 50,79 persen.

Tabel 6
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap
Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rp.)	DAU thd Pendapatan (%)	DAU thd Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5 085 245	4 920 627	1 314 372	25,85	26,71
Kab. Kulon Progo	1 425 110	1 430 456	705 869	49,53	49,35
Kab. Bantul	2 086 879	2 076 742	982 251	47,07	47,30
Kab. Gunungkidul	1 847 105	1 860 226	938 221	50,79	50,44
Kab. Sleman	2 615 515	2 489 597	996 492	38,10	40,03
Kota Yogyakarta	1 658 430	1 484 553	658 504	39,71	44,36

Pada tabel 7 di bawah ini dapat dilihat besarnya persentase dana alokasi umum terhadap pendapatan asli pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta lima tahun terakhir yaitu dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Secara umum terjadi penurunan persentase besarnya dana alokasi umum terhadap pendapatan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan usaha pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan keuangan dari pusat.

Tabel 7
Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 - 2017

Pemerintah Daerah	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	29,31	28,66	27,07	24,13	25,85
Kab. Kulon Progo	59,31	57,07	53,55	52,91	49,53
Kab. Bantul	56,23	52,33	48,32	49,98	47,07
Kab. Gunungkidul	62,72	61,72	54,57	57,73	50,79
Kab. Sleman	46,94	45,84	42,90	43,55	38,10
Kota Yogyakarta	45,60	42,39	43,40	42,49	39,71

Persentase dana alokasi umum (DAU) terhadap rencana anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rp.)	Rencana Belanja (Juta Rp.)	Rencana Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rp.)	DAU thd Rencana Pendapatan (%)	DAU thd Rencana Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5 182 970	5 544 332	1 314 372	25,36	23,71
Kab. Kulon Progo	1 530 542	1 533 288	705 869	46,12	46,04
Kab. Bantul	2 056 183	2 205 490	982 251	47,77	44,54
Kab. Gunungkidul	1 847 105	1 814 778	938 221	50,79	51,70
Kab. Sleman	2 515 874	2 627 296	996 492	39,61	37,93
Kota Yogyakarta	1 623 734	1 691 313	658 504	40,55	38,93

Belanja daerah dibedakan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sesuai Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Tabel 9
Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (Juta Rp.)	Persentase terhadap Total Belanja Daerah	Belanja Langsung (Juta Rp.)	Persentase terhadap Total Belanja Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	2 566 834	52,16	2 353 793	47,84
Kab. Kulon Progo	810 864	56,69	619 592	43,31
Kab. Bantul	1 116 643	53,77	960 100	46,23
Kab. Gunungkidul	1 079 606	58,04	780 620	41,96
Kab. Sleman	1 299 646	52,20	1189 950	47,80
Kota Yogyakarta	590 742	39,79	893 811	60,21

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta selama tahun 2017 menghabiskan dana 2,566 triliun rupiah (52,16 persen dari total belanja) untuk belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Secara umum persentase pos pembelanjaan daerah pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta masih digunakan untuk pos belanja tidak langsung, kecuali Kota Yogyakarta.

Gambar 2
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung
D.I.Yogyakarta 2017 (%)



Kota Yogyakarta mempunyai proporsi belanja tidak langsung yang paling rendah diantara kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 39,79 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 52,20 persen, dan diikuti Kabupaten Bantul sebesar 53,77 persen. Sebaliknya daerah yang memiliki proporsi belanja tidak langsung terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul dengan 58,04 persen terhadap realisasi belanja daerahnya.

Tabel 10
Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Pendapatan
Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 – 2017

Pemerintah Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	Perkem- bangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
D.I.Yogyakarta	57,40	52,34	53,26	51,26	50,48	-6.92
Kab. Kulon Progo	67,94	65,44	64,12	65,12	56,90	-11.04
Kab. Bantul	66,02	57,55	60,42	63,28	53,51	-12.51
Kab. Gunungkidul	69,44	69,02	66,40	68,83	58,45	-10.99
Kab. Sleman	62,60	57,73	56,60	59,29	49,69	-12.91
Kota Yogyakarta	51,37	49,52	50,49	49,72	35,62	-15.75

Pada Tahun 2017 belanja tidak langsung secara umum mengalami penurunan. Penurunan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 15,75 persen, sedangkan penurunan terendah terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 10,99 persen. Untuk Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta juga mengalami penurunan sebesar 6,92 persen.

Adapun persentase rencana belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap rencana belanja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11
Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

Pemerintah Daerah	Rencana Belanja Tidak Langsung (Juta Rp.)	Persentase thd Total Rencana Belanja Daerah	Rencana Belanja Langsung (Juta Rp.)	Persentase thd Total Rencana Belanja Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	2 714 312	48,96	2 830 020	51,04
Kab. Kulon Progo	828 098	54,01	705 191	45,99
Kab. Bantul	1 225 090	55,55	980 400	44,45
Kab. Gunungkidul	1 128 996	62,21	685 782	37,79
Kab. Sleman	1 421 514	54,11	1 205 783	45,89
Kota Yogyakarta	755 968	44,70	935 346	55,30

Pada tabel 12 dapat dilihat bahwa realisasi belanja menurut fungsinya hampir semua Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dibelanjakan untuk anggaran pada sektor pendidikan yang bisa dilihat dari persentase belanja di sektor pendidikan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada penduduknya. Sektor yang memperoleh anggaran besar selanjutnya adalah sektor pelayanan umum, sektor kesehatan, dan sektor perumahan & fasilitas umum.

Berbeda dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, sektor pendidikan belum memperoleh porsi anggaran yang tinggi untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa. Anggaran terbesar untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibelanjakan untuk sektor pelayanan umum, selanjutnya sektor pendidikan, pariwisata & budaya, serta lingkungan hidup

Tabel 12
Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kab Kulon progo	Kab Bantul	Kab Gunung kidul	Kab Sleman	Kota Yogya- karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	19,76	25,21	27,39	26,94	31,70	18,98
2. Ketertiban dan Keamanan	1,22	1,72	1,16	0,69	1,15	2,55
3. Ekonomi	9,82	7,70	6,45	4,70	6,05	11,82
4. Lingkungan Hidup	14,51	0,55	1,15	2,84	1,40	4,98
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	10,26	12,08	9,57	12,91	12,88	10,76
6. Kesehatan	10,23	17,81	17,76	13,21	15,77	19,86
7. Pariwisata dan Budaya	16,16	0,84	1,71	1,30	0,82	2,10
8. Pendidikan	16,31	33,16	33,29	36,27	29,48	27,36
9. Perlindungan Sosial	1,74	0,91	1,54	1,13	0,73	1,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

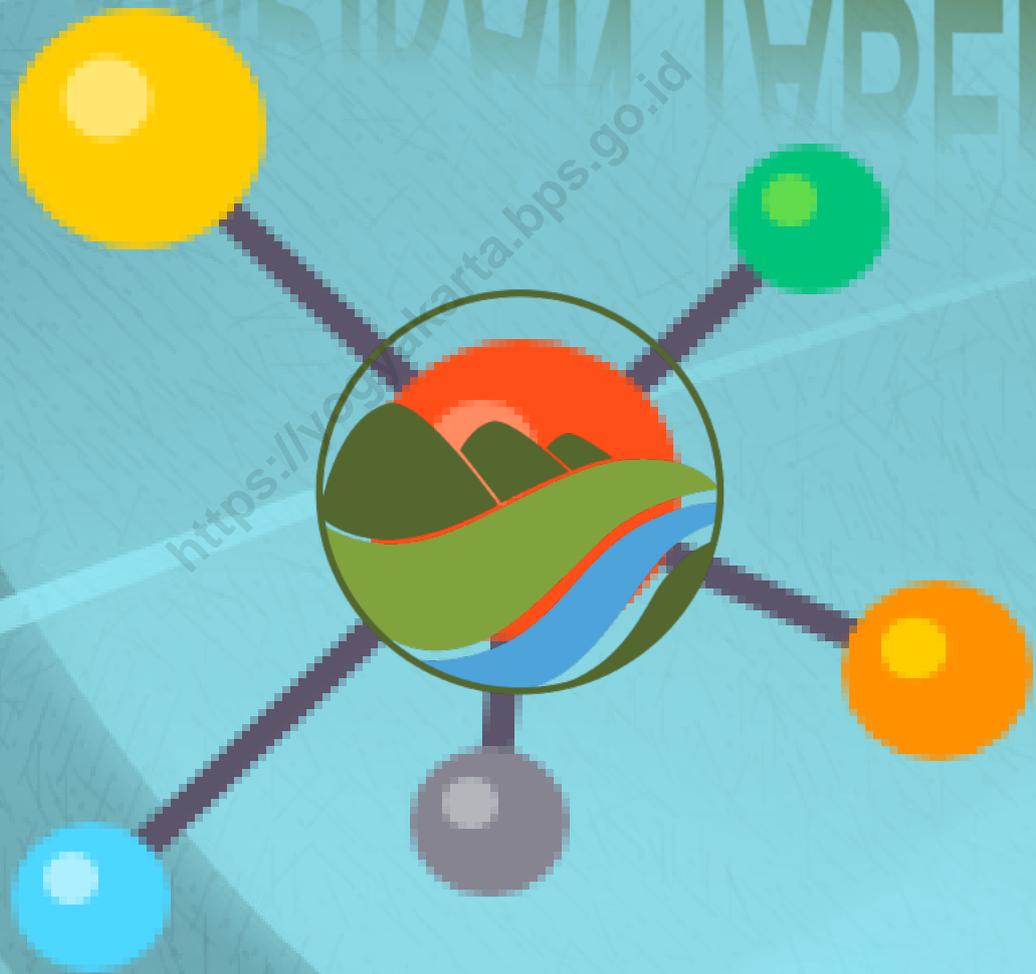
Rencana prioritas belanja pada tahun anggaran 2018 tidak banyak berubah dibanding realisasi belanja tahun 2017. Hal ini terlihat dari besarnya persentase masing-masing sektor belanja yang tidak jauh berbeda dibanding realisasi anggaran tahun sebelumnya. Pada rencana anggaran pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor pendidikan, pelayanan umum, kesehatan dan sektor perumahan dan fasilitas umum masih mendapatkan porsi belanja yang lebih besar dibanding sektor lainnya.

Sedangkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta porsi belanja yang paling besar masih pada sektor pelayanan umum, diikuti sektor pendidikan dan lingkungan hidup. Persentase besarnya rencana belanja anggaran Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13
Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta
2018

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kab Kulon progo	Kab Bantul	Kab Gunung kidul	Kab Sleman	Kota Yogya- karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	37.21	24.37	30.35	28.45	32.97	26.55
2. Ketertiban dan Keamanan	0.94	0.70	1.05	0.78	1.16	2.30
3. Ekonomi	7.79	6.03	6.29	4.73	5.81	10.55
4. Lingkungan Hidup	10.96	0.63	1.77	3.55	1.82	3.99
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	7.92	10.57	7.36	9.95	13.60	8.79
6. Kesehatan	2.82	24.18	20.70	13.16	13.65	19.18
7. Pariwisata dan Budaya	7.20	0.97	1.07	1.26	1.12	1.98
8. Pendidikan	24.03	31.75	30.33	37.08	28.61	25.20
9. Perlindungan Sosial	1.13	0.81	1.08	1.04	1.26	1.45
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

LAMPIRAN TABEL



Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	5 085 245 126	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1 851 977 303	36,42
1.2	Dana Perimbangan	2 379 856 462	46,80
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	853 411 361	16,78
II	Belanja Daerah	4 920 626 777	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	2 566 833 809	52,16
2.2	Belanja Langsung	2 353 792 968	47,84
	Surplus	164 618 349	
	Pembiayaan Netto	179 451 993	

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	1 851 977 303	36,42
1.1	Pajak Daerah	1 583 875 064	31,15
1.2	Retribusi Daerah	41 432 294	0,81
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	71 411 760	1,40
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155 258 185	3,05
II	Dana Perimbangan	2 379 856 462	46,80
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	98 483 456	1,94
2.2	Dana Alokasi Umum	1 314 372 147	25,85
2.3	Dana Alokasi Khusus	967 000 859	19,02
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	853 411 361	16,78
	Jumlah Pendapatan Daerah	5 085 245 126	100,00

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	2 566 833 809	52,16
1.1	Belanja Pegawai	1 258 150 198	25,57
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	574 360 049	11,67
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1 091 000	0,02
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	647 149 358	13,15
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	78 428 154	1,59
1.8	Belanja Tidak Terduga	7 655 050	0,16
II	Belanja Langsung	2 353 792 968	47,84
2.1	Belanja Pegawai	170 544 759	3,47
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1 136 518 067	23,10
2.3	Belanja Modal	1 046 730 142	21,27
Jumlah Belanja Daerah		4 920 626 777	100,00

Tabel 1.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	490 112 031	19,76
2	Ketertiban dan Keamanan	30 244 554	1,22
3	Ekonomi	243 607 461	9,82
4	Lingkungan Hidup	359 991 156	14,51
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	254 413 810	10,26
6	Kesehatan	253 791 865	10,23
7	Pariwisata dan Budaya	400 902 389	16,16
8	Pendidikan	404 645 471	16,31
9	Perlindungan Sosial	43 136 409	1,74
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2 480 845 146	100,00

Tabel 1.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	5 182 969 635	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1 734 005 739	33,46
1.2	Dana Perimbangan	2 396 221 853	46,23
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1 052 742 043	20,31
II	Belanja Daerah	5 544 331 778	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	2 714 312 157	48,96
2.2	Belanja Langsung	2 830 019 621	51,04
	Surplus	(361 362 143)	
	Pembiayaan Netto	361 362 143	

Tabel 1.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	1 734 005 739	33,46
1.1	Pajak Daerah	1 525 970 678	29,44
1.2	Retribusi Daerah	37 471 041	0,72
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75 639 486	1,46
1.4	Lain –lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	94 924 534	1,83
II	Dana Perimbangan	2 396 221 853	46,23
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	135 665 957	2,62
2.2	Dana Alokasi Umum	1 314 372 147	25,36
2.3	Dana Alokasi Khusus	946 183 749	18,26
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1 052 742 043	20,31
	Jumlah Pendapatan Daerah	5 182 969 635	100,00

Tabel 1.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	2 714 312 157	48,96
1.1	Belanja Pegawai	1 335 096 081	24,08
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	641 512 530	11,57
1.5	Belanja Bantuan Sosial	850 000	0,02
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	634 100 706	11,44
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	83 017 073	1,50
1.8	Belanja Tidak Terduga	19 735 767	0,36
II	Belanja Langsung	2 830 019 621	51,04
2.1	Belanja Pegawai	243 860 679	4,40
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1 400 423 088	25,26
2.3	Belanja Modal	1 185 735 854	21,39
Jumlah Belanja Daerah		5 544 331 778	100,00

Tabel 1.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	2 063 257 994	37,21
2	Ketertiban dan Keamanan	52 168 405	0,94
3	Ekonomi	431 978 611	7,79
4	Lingkungan Hidup	607 479 031	10,96
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	438 969 013	7,92
6	Kesehatan	156 504 864	2,82
7	Pariwisata dan Budaya	398 947 479	7,20
8	Pendidikan	1 332 372 751	24,03
9	Perlindungan Sosial	62 653 630	1,13
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		5 544 331 778	100,00

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1 425 110 287	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	249 692 649	17,52
1.2	Dana Perimbangan	942 334 185	66,12
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	233 083 453	16,36
II	Belanja Daerah	1 430 456 004	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	810 863 636	56,69
2.2	Belanja Langsung	619 592 368	43,31
	Surplus	(5 345 717)	
	Pembiayaan Netto	59 395 050	

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (000Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	249 692 649	17,52
1.1	Pajak Daerah	47 237 504	3,31
1.2	Retribusi Daerah	7 340 858	0,52
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15 783 396	1,11
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	179 330 891	12,58
II	Dana Perimbangan	942 334 185	66,12
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	26 200 470	1,84
2.2	Dana Alokasi Umum	705 868 940	49,53
2.3	Dana Alokasi Khusus	210 264 775	14,75
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	233 083 453	16,36
Jumlah Pendapatan Daerah		1 425 110 287	100,00

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	810 863 636	56,69
1.1	Belanja Pegawai	605 074 535	42,30
1.2	Belanja Bunga	461 446	0,0323
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	21 776 383	1,522
1.5	Belanja Bantuan Sosial	25 261 804	1,77
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	4 600 444	0,32
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	152 702 640	10,68
1.8	Belanja Tidak Terduga	986 384	0,07
II	Belanja Langsung	619 592 368	43,31
2.1	Belanja Pegawai	34 134 406	2,39
2.2	Belanja Barang dan Jasa	326 691 503	22,84
2.3	Belanja Modal	258 766 459	18,09
Jumlah Belanja Daerah		1 430 456 004	100,00

Tabel 2.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	360 674 523	25,21
2	Ketertiban dan Keamanan	24 611 404	1,72
3	Ekonomi	110 214 079	7,70
4	Lingkungan Hidup	7 889 795	0,55
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	172 806 510	12,08
6	Kesehatan	254 821 858	17,81
7	Pariwisata dan Budaya	12 033 152	0,84
8	Pendidikan	474 318 835	33,16
9	Perlindungan Sosial	13 085 848	0,91
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1 430 456 004	100,00

Tabel 2.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1 530 542 496	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	207 069 274	13,53
1.2	Dana Perimbangan	993 976 585	64,94
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	329 496 637	21,53
II	Belanja Daerah	1 533 288 495	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	828 097 599	54,01
2.2	Belanja Langsung	705 190 896	45,99
	Surplus	(2 745 999)	
	Pembiayaan Netto	2 746 000	

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	207 069 274	13,53
1.1	Pajak Daerah	57 687 397	3,77
1.2	Retribusi Daerah	8 325 785	0,54
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15 531 112	1,01
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	125 524 980	8,20
II	Dana Perimbangan	993 976 585	64,94
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	27 678 780	1,81
2.2	Dana Alokasi Umum	705 868 940	46,12
2.3	Dana Alokasi Khusus	260 428 865	17,02
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	329 496 637	21,53
Jumlah Pendapatan Daerah		1 530 542 496	100,00

**Tabel 2.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	828 097 599	54,01
1.1	Belanja Pegawai	618 845 504	40,36
1.2	Belanja Bunga	477 109	0,03
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	23 949 790	1,56
1.5	Belanja Bantuan Sosial	20 738 700	1,35
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	6 601 319	0,43
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	152 826 043	9,97
1.8	Belanja Tidak Terduga	4 659 134	0,30
II	Belanja Langsung	705 190 896	45,99
2.1	Belanja Pegawai	37 397 890	2,44
2.2	Belanja Barang dan Jasa	304 808 662	19,88
2.3	Belanja Modal	362 984 344	23,67
Jumlah Belanja Daerah		1 533 288 495	100,00

Tabel 2.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	373 600 674	24,37
2	Ketertiban dan Keamanan	10 658 327	0,70
3	Ekonomi	92 483 359	6,03
4	Lingkungan Hidup	9 735 466	0,63
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	162 029 741	10,57
6	Kesehatan	370 736 694	24,18
7	Pariwisata dan Budaya	14 911 746	0,97
8	Pendidikan	486 764 260	31,75
9	Perlindungan Sosial	12 368 225	0,81
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1 533 288 492	100,00

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2 086 878 990	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	494 179 068	23,68
1.2	Dana Perimbangan	1 287 256 263	61,68
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	305 443 659	14,64
II	Belanja Daerah	2 076 742 163	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 116 642 512	53,77
2.2	Belanja Langsung	960 099 651	46,23
	Surplus	10 136 827	
	Pembiayaan Netto	237 089 481	

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	494 179 068	23,68
1.1	Pajak Daerah	165 562 359	7,93
1.2	Retribusi Daerah	31 575 738	1,51
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20 130 437	0,96
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah	276 910 534	13,27
II	Dana Perimbangan	1 287 256 263	61,68
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	34 871 179	1,67
2.2	Dana Alokasi Umum	982 250 842	47,07
2.3	Dana Alokasi Khusus	270 134 242	12,94
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	305 443 659	14,64
	Jumlah Pendapatan Daerah	2 086 878 990	100,00

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1 116 642 512	53,77
1.1	Belanja Pegawai	825 306 292	39,74
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	50 474 188	2,43
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1 650 300	0,08
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	14 330 195	0,69
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	222 760 211	10,73
1.8	Belanja Tidak Terduga	2 121 326	0,10
II	Belanja Langsung	960 099 651	46,23
2.1	Belanja Pegawai	69 976 099	3,37
2.2	Belanja Barang dan Jasa	557 504 287	26,85
2.3	Belanja Modal	332 619 265	16,02
Jumlah Belanja Daerah		2 076 742 163	100,00

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	568 829 024	27,39
2	Ketertiban dan Keamanan	24 016 319	1,16
3	Ekonomi	133 851 687	6,45
4	Lingkungan Hidup	23 800 343	1,15
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	198 741 001	9,57
6	Kesehatan	368 899 365	17,76
7	Pariwisata dan Budaya	35 435 339	1,71
8	Pendidikan	691 265 322	33,29
9	Perlindungan Sosial	31 903 763	1,54
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2 076 742 163	100,00

Tabel 3.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2 056 183.267	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	420 143.107	20,43
1.2	Dana Perimbangan	1 376 480.531	66,94
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	259 559.629	12,62
II	Belanja Daerah	2 205 489.940	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 225 089.698	55,55
2.2	Belanja Langsung	980 400.242	44,45
	Surplus	(149 306.673)	
	Pembiayaan Netto	149 306.673	

Tabel 3.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	420 143 107	20,43
1.1	Pajak Daerah	144 571 000	7,03
1.2	Retribusi Daerah	34 545 806	1,68
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19 707 296	0,96
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	221 319 005	10,76
II	Dana Perimbangan	1 376 480 531	66,94
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	38 161 003	1,86
2.2	Dana Alokasi Umum	982 250 842	47,77
2.3	Dana Alokasi Khusus	356 068 686	17,32
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	259 559 629	12,62
Jumlah Pendapatan Daerah		2 056 183 267	100,00

Tabel 3.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1 225 089 698	55,55
1.1	Belanja Pegawai	878 610 267	39,84
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	55 370 075	2,51
1.5	Belanja Bantuan Sosial	8 648 200	0,39
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	17 564 212	0,80
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	249 148 017	11,30
1.8	Belanja Tidak Terduga	15 748 927	0,71
II	Belanja Langsung	980 400 242	44,45
2.1	Belanja Pegawai	93 280 877	4,23
2.2	Belanja Barang dan Jasa	571 940 966	25,93
2.3	Belanja Modal	315 178 399	14,29
Jumlah Belanja Daerah		2 205 489 940	100,00

Tabel 3.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	669 342 370	30,35
2	Ketertiban dan Keamanan	23 130 685	1,05
3	Ekonomi	138 658 333	6,29
4	Lingkungan Hidup	39 066 266	1,77
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	162 347 892	7,36
6	Kesehatan	456 491 392	20,70
7	Pariwisata dan Budaya	23 579 152	1,07
8	Pendidikan	668 991 527	30,33
9	Perlindungan Sosial	23 882 323	1,08
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2 205 489.940	100,00

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1 847 105 419	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	271 370 044	14,69
1.2	Dana Perimbangan	1 250 742 434	67,71
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	324 992 941	17,59
II	Belanja Daerah	1 860 225 638	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 079 605 853	58,04
2.2	Belanja Langsung	780 619 785	41,96
	Surplus	(13 120 219)	
	Pembiayaan Netto	181 630 038	

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	271 370 044	14,69
1.1	Pajak Daerah	43 686 046	2,37
1.2	Retribusi Daerah	34 783 665	1,88
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13 088 999	0,71
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	179 811 334	9,73
II	Dana Perimbangan	1 250 742 434	67,71
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	28 812 650	1,56
2.2	Dana Alokasi Umum	938 221 136	50,79
2.3	Dana Alokasi Khusus	283 708 648	15,36
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	324 992 941	17,59
	Jumlah Pendapatan Daerah	1 847 105 419	100,00

Tabel 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1 079 605 853	58,04
1.1	Belanja Pegawai	809 386 841	43,51
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	22 234 698	1,20
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	9 497 596	0,51
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	235 850 041	12,68
1.8	Belanja Tidak Terduga	2 636 677	0,14
II	Belanja Langsung	780 619 785	41,96
2.1	Belanja Pegawai	36 470 062	1,96
2.2	Belanja Barang dan Jasa	347 304 479	18,67
2.3	Belanja Modal	396 845 244	21,33
Jumlah Belanja Daerah		1 860 225 638	100,00

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	501 114 890	26,94
2	Ketertiban dan Keamanan	12 842 971	0,69
3	Ekonomi	87 494 175	4,70
4	Lingkungan Hidup	52 835 703	2,84
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	240 138 528	12,91
6	Kesehatan	245 750 770	13,21
7	Pariwisata dan Budaya	24 219 616	1,30
8	Pendidikan	674 790 712	36,27
9	Perlindungan Sosial	21 038 275	1,13
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1 860 225 638	100,00

Tabel 4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1 716 742 745	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	208 747 851	12,16
1.2	Dana Perimbangan	1 297 211 891	75,56
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	210 783 003	12,28
II	Belanja Daerah	1 814 778 220	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 128 995 929	62,21
2.2	Belanja Langsung	685 782 291	37,79
	Surplus	(98 035 475)	
	Pembiayaan Netto	98 035 475	

Tabel 4.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	208 747 851	12,16
1.1	Pajak Daerah	41 388 250	2,41
1.2	Retribusi Daerah	36 061 985	2,10
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14 626 002	0,85
1.4	Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116 671 614	6,80
II	Dana Perimbangan	1 297 211 891	75,56
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	27 589 808	1,61
2.2	Dana Alokasi Umum	938 221 136	54,65
2.3	Dana Alokasi Khusus	331 400 947	19,30
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	210 783 003	12,28
Jumlah Pendapatan Daerah		1 716 742 745	100,00

**Tabel 4.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1 128 995 930	62,21
1.1	Belanja Pegawai	867 313 854	47,79
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	23 364 375	1,29
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	9 136 447	0,50
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	219 827 641	12,11
1.8	Belanja Tidak Terduga	9 353 613	0,52
II	Belanja Langsung	685 782 291	37,79
2.1	Belanja Pegawai	41 859 883	2,31
2.2	Belanja Barang dan Jasa	337 961 118	18,62
2.3	Belanja Modal	305 961 290	16,86
Jumlah Belanja Daerah		1 814 778 220	100,00

Tabel 4.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	516 354 733	28,45
2	Ketertiban dan Keamanan	14 101 871	0,78
3	Ekonomi	85 811 695	4,73
4	Lingkungan Hidup	64 492 931	3,55
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	180 567 441	9,95
6	Kesehatan	238 809 711	13,16
7	Pariwisata dan Budaya	22 813 284	1,26
8	Pendidikan	672 916 991	37,08
9	Perlindungan Sosial	18 909 564	1,04
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1 814 778 220	100,00

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2 615 515 097	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	825 637 752	31,57
1.2	Dana Perimbangan	1 335 572 521	51,06
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	454 304 824	17,37
II	Belanja Daerah	2 489 596 631	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 299 646 260	52,20
2.2	Belanja Langsung	1 189 950 371	47,80
	Surplus	125 918 466	
	Pembiayaan Netto	291 740 495	

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	825 637 752	31,57
1.1	Pajak Daerah	528 453 216	20,20
1.2	Retribusi Daerah	48 706 089	1,86
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36 292 784	1,39
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	212 185 663	8,11
II	Dana Perimbangan	1 335 572 521	51,06
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	60 499 721	2,31
2.2	Dana Alokasi Umum	996 492 454	38,10
2.3	Dana Alokasi Khusus	278 580 346	10,65
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	454 304 824	17,37
	Jumlah Pendapatan Daerah	2 615 515 097	100,00

Tabel 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1 299 646 260	52,20
1.1	Belanja Pegawai	950 142 604	38,16
1.2	Belanja Bunga	2 358 581	0,09
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	47 965 960	1,93
1.5	Belanja Bantuan Sosial	34 694 686	1,39
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	48 747 898	1,96
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	214 565 612	8,62
1.8	Belanja Tidak Terduga	1 170 919	0,05
II	Belanja Langsung	1 189 950 371	47,80
2.1	Belanja Pegawai	178 352 824	7,16
2.2	Belanja Barang dan Jasa	630 970 492	25,34
2.3	Belanja Modal	380 627 055	15,29
Jumlah Belanja Daerah		2 489 596 631	100,00

Tabel 5.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	789 268 825	31,70
2	Ketertiban dan Keamanan	28 673 172	1,15
3	Ekonomi	150 684 441	6,05
4	Lingkungan Hidup	34 933 440	1,40
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	320 693 017	12,88
6	Kesehatan	392 622 810	15,77
7	Pariwisata dan Budaya	20 370 615	0,82
8	Pendidikan	734 055 299	29,48
9	Perlindungan Sosial	18 295 113	0,73
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2 489 596 731	100,00

Tabel 5.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2 515 873 897	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	762 514 523	30,31
1.2	Dana Perimbangan	1 492 722 938	59,33
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	260 636 436	10,36
II	Belanja Daerah	2 627 296 346	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 421 513 820	54,11
2.2	Belanja Langsung	1 205 782 526	45,89
	Surplus	(111 422 449)	
	Pembiayaan Netto	111 422 449	

Tabel 5.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	762 514 523	30,31
1.1	Pajak Daerah	488 064 379	19,40
1.2	Retribusi Daerah	42 701 688	1,70
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34 615 903	1,38
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	197 132 553	7,84
II	Dana Perimbangan	1 492 722 938	59,33
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	76 118 390	3,03
2.2	Dana Alokasi Umum	996 492 454	39,61
2.3	Dana Alokasi Khusus	420 112 094	16,70
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	260 636 436	10,36
Jumlah Pendapatan Daerah		2 515 873 897	100,00

Tabel 5.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1 421 513 820	54,11
1.1	Belanja Pegawai	1 057 009 062	40,23
1.2	Belanja Bunga	1 870 801	0,07
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	54 066 119	2,06
1.5	Belanja Bantuan Sosial	32 735 000	1,25
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	52 040 169	1,98
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	220 273 517	8,38
1.8	Belanja Tidak Terduga	3 519 152	0,13
II	Belanja Langsung	1 205 782 526	45,89
2.1	Belanja Pegawai	199 531 933	7,59
2.2	Belanja Barang dan Jasa	641 612 495	24,42
2.3	Belanja Modal	364 638 098	13,88
Jumlah Belanja Daerah		2 627 296 346	100,00

Tabel 5.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	866 276 680	32,97
2	Ketertiban dan Keamanan	30 479 098	1,16
3	Ekonomi	152 600 025	5,81
4	Lingkungan Hidup	47 772 809	1,82
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	357 396 574	13,60
6	Kesehatan	358 574 601	13,65
7	Pariwisata dan Budaya	29 354 210	1,12
8	Pendidikan	751 714 727	28,61
9	Perlindungan Sosial	33 128 616	1,26
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2 627 297 341	100,00

**Tabel 6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2017
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1 658 429 634	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	657 049 377	39,62
1.2	Dana Perimbangan	870 512 719	52,49
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	130 867 538	7,89
II	Belanja Daerah	1 484 552 899	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	590 741 805	39,79
2.2	Belanja Langsung	893 811 094	60,21
	Surplus	173 876 735	
	Pembiayaan Netto	79.747.480	

Tabel 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	657 049 377	39,62
1.1	Pajak Daerah	426 039 935	25,69
1.2	Retribusi Daerah	38 680 069	2,33
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29 109 252	1,76
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163 220 121	9,84
II	Dana Perimbangan	870 512 719	52,49
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	42 293 359	2,55
2.2	Dana Alokasi Umum	658 504 186	39,71
2.3	Dana Alokasi Khusus	169 715 174	10,23
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	130 867 538	7,89
Jumlah Pendapatan Daerah		1 658 429 634	100,00

Tabel 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	590 741 805	39,79
1.1	Belanja Pegawai	534 485 737	36,00
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	53 381 416	3,60
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1 384 850	0,09
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1 241 353	0,08
1.8	Belanja Tidak Terduga	248 449	0,02
II	Belanja Langsung	893 811 094	60,21
2.1	Belanja Pegawai	167 353 780	11,27
2.2	Belanja Barang dan Jasa	432 156 359	29,11
2.3	Belanja Modal	294 300 955	19,82
Jumlah Belanja Daerah		1 484 552 899	100,00

Tabel 6.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	281 756 914	18,98
2	Ketertiban dan Keamanan	37 843 123	2,55
3	Ekonomi	175 479 362	11,82
4	Lingkungan Hidup	73 962 319	4,98
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	159 748 729	10,76
6	Kesehatan	294 878 863	19,86
7	Pariwisata dan Budaya	31 193 419	2,10
8	Pendidikan	406 123 142	27,36
9	Perlindungan Sosial	23 567 027	1,59
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1 484 552 899	100,00

Tabel 6.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1 623 734 000	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	551 493 528	33,96
1.2	Dana Perimbangan	912 713 788	56,21
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	159 526 684	9,82
II	Belanja Daerah	1 691 313 278	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	755 967 604	44,70
2.2	Belanja Langsung	935 345 674	55,30
	Surplus	(67 579 278)	
	Pembiayaan Netto	67 579 278	

Tabel 6.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	551 493 528	33,96
1.1	Pajak Daerah	356 806 500	21,97
1.2	Retribusi Daerah	33 333 653	2,05
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27 955 341	1,72
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133 398 034	8,22
II	Dana Perimbangan	912 713 788	56,21
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	66 079 502	4,07
2.2	Dana Alokasi Umum	658 504 186	40,55
2.3	Dana Alokasi Khusus	188 130 100	11,59
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	159 526 684	9,82
	Jumlah Pendapatan Daerah	1 623 734 000	100,00

Tabel 6.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	755 967 604	44,70
1.1	Belanja Pegawai	669 726 725	39,60
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	69 075 029	4,08
1.5	Belanja Bantuan Sosial	9 145 200	0,54
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	4 520 650	0,27
1.8	Belanja Tidak Terduga	3 500 000	0,21
II	Belanja Langsung	935 345 674	55,30
2.1	Belanja Pegawai	128 625 903	7,61
2.2	Belanja Barang dan Jasa	543 506 866	32,14
2.3	Belanja Modal	263 212 905	15,56
Jumlah Belanja Daerah		1 691 313 278	100,00

Tabel 6.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	449 106 617	26,55
2	Ketertiban dan Keamanan	38 905 134	2,30
3	Ekonomi	178 475 909	10,55
4	Lingkungan Hidup	67 410 573	3,99
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	148 718 792	8,79
6	Kesehatan	324 469 727	19,18
7	Pariwisata dan Budaya	33 549 368	1,98
8	Pendidikan	426 172 842	25,20
9	Perlindungan Sosial	24 504 316	1,45
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1 691 313278	100,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://yogyakarta.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Brawijaya Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183
Telp. (0274) 4342234, Fax. (0274) 4342230
E-mail: bps3400@bps.go.id Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id>

ISSN 2598-2664



978-602-139-246-1